



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANSAR RASIDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 191576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 811.305.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/200 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 317.680.000
2. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 23.650.000
3. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 138.600.000
4. Tanah Seluas 334 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 110.220.000
5. Tanah Seluas 379 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 41.690.000
6. Tanah Seluas 2830 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 108.955.000
7. Tanah Seluas 1282 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 70.510.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 39.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 433.100.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	178.725.000
Sub Total	Rp.	1.462.130.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.462.130.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.